

ABSTRAK
**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 28/PUU-XI/2013 TERHADAP AKTA KOPERASI YANG DIBUAT OLEH
NOTARIS**

Koperasi diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat sebagaimana badan usaha lainnya. Pemerintah menyikapi hal tersebut dengan mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena dianggap sudah tidak sesuai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dianggap dapat mengakomodir gerak Koperasi sebagai badan usaha yang mandiri dan profesional. Gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dilontarkan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinilai merugikan para pelaku koperasi yang umumnya golongan ekonomi lemah, karena sangat berorientasi bisnis menyerupai badan usaha Perseroan Terbatas.

Permasalahan dikemukakan adalah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 membawa dampak pada legalitas Koperasi yang dibuat berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris? Bagaimanakah status Badan Hukum Koperasi yang Anggaran Dasarnya masih berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian?

Metode Penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis hasil wawancara dengan Notaris, pihak Kementerian Koperasi, Pengurus Koperasi sebagai data primer. Analisa juga dilakukan terhadap Putusan MK nomor 28/PUU-IX/2013. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yakni melakukan analisa kualitatif sehingga didapat gambaran secara sistematis, faktual, akurat. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan dan Teori Kemanfaatan.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat dijadikan alasan merubah akta pendirian bagi Koperasi yang sudah berdiri berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, demikian pula halnya dengan status badan hukum koperasi tersebut. Putusan Pengadilan merupakan sumber hukum yang paling rendah, sehingga apabila harus ada perubahan pada akta koperasi dimaksud maka harus oleh Undang-Undang Perkoperasian yang baru.

Harus segera dibuat Undang-Undang Perkoperasian yang baru agar tidak terjadi dualisme yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Kementerian Koperasi harus berupaya melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap koperasi agar para pelaku koperasi memiliki pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Akta, Badan Hukum Koperasi, Putusan, Undang-Undang.

ABSTRACT

Legal Consequences On The Annulment Of Law Number 17 Of 2012 Concerning Cooperatives Caused by The Decision Of Constitutional Court Number 28/PUU-XI/2013 Against Deed Of Cooperative Drawn Up by Notary

Cooperatives are expected to grow and develop as other business entities. The Government has responded to it by replacing the Act Number 25 Year 1992 on Cooperatives because it was not suitable. Act Number 17 Year 2012 on Cooperatives is considered to accommodate the cooperative movement as an independent and professional business entity. Judicial review to the Act Number 17 Year 2012 on cooperatives requested to the Constitutional Court by some cooperatives. Act Number 17 Year 2012 on Cooperatives deemed damages cooperative actors generally for weak economic group, because it is so business-oriented such as Limited Liability Company.

The problems raised is ordered Constitutional Court Decision Number 28/PUU-IX/2013 had an impact on legality of Cooperatives made pursuant to Act Number 17 Year 2012 on Cooperatives. How legal consequences of the abrogation of Act Number 17 Year 2012 on Cooperatives to Cooperatives deed made by Notary? How is the status of Cooperative's legal entity where the Articles of Association still based on Law Number 17 Year 2012 on Cooperatives?

The research method used is empirical juridical approach by analyzing interview results with Notary, Ministry of Cooperatives, and Cooperative Management as primary data. Analysis was also conducted on Court Decision Number 28/PUU-IX/2013. The nature of research is descriptive qualitative analysis in order to obtain systematic, factual, accurate picture. The discussion is done by using The Rule of Law Theory, Justice and Expediency Theory.

The conclusion that can be presented is that Constitutional Court's Order can not automatically be used as a reason to change the deed for cooperation that has been established by Act Number 17 Year 2012 on Cooperatives, as well as with legal status of the cooperative. The court decision is the lowest legal source, so that if there should be changes to the cooperatives deed then it shall be by new Cooperatives Act.

Immediately it shall be made new Cooperatives Act in order to avoid dualism that causes lack of legal certainty. Ministry of Cooperatives should make serious efforts to socialize and guidance to cooperatives so that cooperative actors have understanding on the rules that apply.

Keywords: Deed, Legal Entity Cooperation, Order, Act.